

## AKSELERASI PEMBANGUNAN PERTANIAN WILAYAH TERTINGGAL MELALUI PENGUATAN KAPASITAS PETANI DAN KELOMPOK TANI

### *Acceleration of Agricultural Development in Disadvantaged Regions Through Strengthening the Capacity of Farmers and Farmers Groups*

Kurnia Suci Indraningsih\*, Dewa K S Swastika

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Jalan Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia  
\*Korespondensi penulis. E-mail: kurniasuci@yahoo.com*

Naskah diterima: 1 Desember 2021

Direvisi: 22 Desember 2021

Disetujui terbit: 14 April 2022

#### ABSTRACT

The livelihood of the people who live in underdeveloped regions mostly depends on the natural resources-based economy, both in the agricultural, industrial, and other potential resource utilization sectors that have not been managed optimally. The agriculture sector is still the primary source of income for those living in disadvantaged regions. Most farmers have low agricultural knowledge and skills. Facilitating policies and funding are needed to improve the economy in those areas. Another problem is the low quality of human resources, especially farmers and their groups, who are the main drivers of agricultural development in their area. Strengthening the capacity of farmers is also one of the essential policies. The study aims to analyze the capacity building of farmers and farmer groups. The method used in the study is a review of various references. Although government support in funding and facilitation is needed, government support should not create dependence on farmers. Instead, it should make farmers independent. Soft loans with simple procedures are believed to be more educated than providing free input assistance. The government should also prioritize counselling and mentoring to improve the capacity of farmers. Training of trainers for extension workers should be conducted regularly to update knowledge and improve competence, so they can transfer the latest knowledge and skills to farmers. Good knowledge and skills and high capacity can create strong and independent farmers. In turn, they can become productive rural economic actors.

**Keywords:** *agricultural development, disadvantaged areas, farmers, human resources*

#### ABSTRAK

Masyarakat di daerah tertinggal masih bertumpu pada sektor ekonomi konvensional berbasis sumber daya alam, baik dalam sektor pertanian, industri, maupun pemanfaatan sumber daya potensial lainnya yang belum dikelola secara optimal. Sektor pertanian menjadi sektor andalan di wilayah tertinggal. Namun untuk menggerakkan pembangunan pertanian di daerah tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi wilayah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama dalam hal pendanaan dan fasilitas. Permasalahan lain adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, terutama petani dan kelompoknya yang merupakan penggerak utama pembangunan pertanian di wilayahnya. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas petani dan kelompok tani dinilai penting untuk dilakukan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penguatan kapasitas petani dan kelompok tani sebagai upaya akselerasi pembangunan pertanian wilayah tertinggal. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah *review* dari berbagai referensi yang relevan dengan topik bahasan. Program pemerintah pusat yang menggulirkan berbagai bantuan hendaknya tidak menimbulkan ketergantungan petani, melainkan harus memunculkan potensi diri petani sehingga mampu mandiri. Program pinjaman lunak dengan prosedur administrasi sederhana dan wajib dikembalikan, dinilai lebih mendidik daripada memberi bantuan saprodi gratis. Penyuluhan dan pendampingan merupakan salah satu strategi untuk peningkatan kapasitas petani, sehingga perlu mendapat prioritas. *Training of Trainer* (TOT) bagi penyuluh hendaknya dilakukan secara reguler untuk meningkatkan kompetensi, sehingga dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang terkini kepada petani dan kelompok tani. Peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan dapat membentuk petani dan kelompok tani yang kuat dan mandiri, sehingga mampu menjadi pelaku ekonomi perdesaan yang produktif.

**Kata kunci:** *kelompok tani, pembangunan pertanian, petani, sumber daya manusia, wilayah tertinggal*

#### PENDAHULUAN

Pembangunan di wilayah tertinggal dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kondisinya dalam

keterbatasan. Keterbatasan ini karena pendidikan dan keterampilan yang rendah, tidak ada modal usaha, tidak memiliki lahan garapan atau luas lahan garapan yang relatif sempit. Masyarakat pada wilayah tertinggal relatif

terisolir dengan jumlah penduduk yang relatif jarang sehingga potensi untuk berkembang menjadi terhambat.

Kesenjangan di wilayah tertinggal semakin diperburuk akibat kesenjangan dalam pembangunan antarsektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi perdesaan) dan nonpertanian (ekonomi perkotaan). Sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian perdesaan, sekalipun sebagian besar kegiatan pertanian dilaksanakan secara konvensional. Secara umum, kesenjangan terjadi tidak saja di lingkup pembangunan pertanian di wilayah perdesaan, tetapi juga di wilayah perkotaan (Syahza dan Suarman 2014)

Permana et al. (2019) mengungkapkan bahwa perdesaan dan perkotaan berkembang sendiri-sendiri seolah terpisah. Tidak terjadi hubungan secara fungsional dalam suatu struktur ruang. Ada beberapa hal yang menyebabkan interaksi desa-kota menjadi suatu hal yang merugikan bagi perkembangan desa, di antaranya karena terbatasnya keterkaitan antara perdesaan dengan perkotaan. Gejala ini berpotensi menimbulkan kesenjangan pembangunan dan peningkatan angka kemiskinan, khususnya di perdesaan. Sebagian besar (84,42%) daerah tertinggal berada di Kawasan Timur Indonesia, dan sebagian lagi (15,58%) berada di Kawasan Barat Indonesia.

Masyarakat di daerah tertinggal umumnya masih bertumpu pada sektor ekonomi konvensional berbasis sumber daya alam, baik dalam subsektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, maupun sumber daya potensial lainnya yang belum dikelola secara optimal. Terbatasnya infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum menyebabkan produk yang dihasilkan masyarakat dari daerah tertinggal kurang kompetitif di pasaran. Untuk itu, diperlukan upaya pengembangan ekonomi lokal yang bersifat produktif dan produknya berdaya saing. Upaya ini bisa dilakukan melalui intervensi pemerintah secara berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang.

Hasil penelitian Wiratama et al. (2018) di Provinsi Jawa Timur, mengungkapkan terdapat kesamaan antara sektor yang memiliki potensi (basis) serta sektor yang memiliki keunggulan kompetitif di setiap wilayah tertinggal di daerah ini, yaitu sektor pertanian. Hal tersebut membuktikan bahwa sektor pertanian menjadi sektor yang mendominasi pertumbuhan PDRB. Penggerak utama pembangunan di sektor pertanian di wilayah ini, adalah petani dan

kelompoknya dalam arti luas (kelompok tani/gabungan kelompok tani, P3A, UPJA, wanita tani, dan sebagainya). Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya kualitas SDM penggerak utama ini, baik dalam hal pendidikan, pengetahuan maupun kemampuannya dalam mengadopsi teknologi maju, sehingga memerlukan upaya peningkatan kapasitasnya. Penyuluhan dan pendampingan merupakan salah satu strategi dalam peningkatan kapasitas petani dan kelompoknya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketertinggalan suatu wilayah diakibatkan oleh masih banyaknya sektor-sektor ekonomi yang belum berkembang di wilayah tertinggal, dengan demikian dibutuhkan prioritas pembangunan untuk menunjang sektor yang belum berkembang, sehingga kemudian seluruh sektor mampu meningkat dan bersaing dengan sektor lainnya. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan ekonomi wilayah yang mendukung berkembangnya sektor ekonomi perdesaan, seperti kebijakan distribusi hasil pertanian, perluasan lahan pertanian, perbaikan sarana prasarana, serta kebijakan informasi usaha pertanian, telekomunikasi, transportasi dan sektor ekonomi lainnya.

Berbagai persoalan yang muncul, terutama rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah tertinggal, perlu dicarikan alternatif pemecahan masalahnya. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penguatan kapasitas petani dan kelompok tani sebagai upaya akselerasi pembangunan pertanian wilayah tertinggal. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah *review* dari berbagai referensi yang relevan dengan topik bahasan. Cakupan pembahasan dibatasi pada aspek penguatan kapasitas petani dan kelompoknya dalam arti luas, sebagai penggerak utama pembangunan pertanian.

## KARAKTERISTIK DAERAH DAN PROFIL PETANI DI WILAYAH TERTINGGAL

### Karakteristik Daerah Tertinggal

Permasalahan mendasar pada daerah tertinggal, paling tidak dicirikan oleh enam indikator, antara lain persoalan kemiskinan penduduk, rendahnya kualitas sumber daya manusia, belum memadainya prasarana atau infrastruktur, terbatasnya kemampuan/kekuatan keuangan daerah, minimnya aksesibilitas untuk mencapai pusat-pusat pelayanan dasar, serta karakteristik daerah yang rawan konflik sosial dan bencana alam. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten dengan wilayah serta

masyarakatnya yang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional yang tercantum pada Peraturan Presiden RI No. 131 Tahun 2015 (Sekretariat Kabinet RI 2015). Ketertinggalan suatu daerah dapat disebabkan karena kegiatan ekonomi masyarakat kurang berkembang, kualitas sumber daya manusia yang rendah, tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, meningkatnya kejadian bencana alam dan konflik sosial, serta akses transportasi, telekomunikasi dan informasi yang rendah.

Penentuan atau pengklasifikasian daerah tertinggal menurut Peraturan Presiden RI No. 131 Tahun 2015 dilakukan dengan indeks komposit berdasarkan enam kriteria dan 27 subindikator ketertinggalan. Kriteria yang digunakan yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Penggunaan indeks komposit dalam proses klasifikasi daerah tertinggal di Indonesia masih belum optimal. Hal ini disebabkan masih ada daerah-daerah yang tidak termasuk kategori tertinggal tetapi cenderung memiliki karakteristik yang sama dengan daerah tertinggal (Sari et al. 2020).

Suatu daerah dikategorikan tertinggal, adalah jika daerah tersebut: (a) secara geografis relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi, (b) dari sisi sumber daya alam, daerah tersebut tidak memiliki potensi, atau memiliki sumber daya alam besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, (c) dari sisi sumber daya manusia, daerah tersebut umumnya memiliki masyarakat dengan tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang, (d) daerah dengan keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial, (e) daerah yang sering mengalami bencana alam dan konflik sosial sehingga berakibat terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi, dan (f) suatu daerah menjadi tertinggal, disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat, seperti kurang memihak pada pembangunan daerah tertinggal, kesalahan

pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan (Mughtar et al. 2011).

Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kementerian Sekretariat Negara RI 2014), maka ditetapkan Peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024 yang ditandatangani pada 27 April 2020 (Kementerian Sekretariat Negara RI 2020). Definisi daerah tertinggal menurut Perpres ini adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Pasal 2 ayat (1) dari Perpres tersebut berbunyi:

*“Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria: (a) perekonomian masyarakat, (b) sumber daya manusia, (c) sarana dan prasarana, (d) kemampuan keuangan daerah, (e) aksesibilitas, dan (f) karakteristik daerah”*

Sesuai Perpres tersebut, pemerintah menetapkan daerah tertinggal setiap lima tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan subindikator ketertinggalan sesuai usulan menteri dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait dan pemerintah daerah. Berdasarkan Perpres ini, dalam hal: (a) adanya pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah kabupaten, atau (b) upaya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, maka Presiden dapat menetapkan daerah tertinggal baru. Berdasarkan Perpres tersebut, menteri melakukan evaluasi terhadap daerah tertinggal secara berkala sesuai dengan jangka waktu perencanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Evaluasi, sebagaimana dimaksud dalam Perpres tersebut, dilakukan dengan menggunakan metode: (a) penghitungan indeks komposit dan (b) analisis kualitatif, yang dilaksanakan oleh menteri melibatkan kementerian/ lembaga terkait lainnya.

### **Kriteria Wilayah Tertinggal**

Kriteria wilayah tertinggal didasarkan pada legislasi, namun kriteria tersebut relatif bisa diperdebatkan, sama halnya dengan kriteria garis kemiskinan. Misalnya, Kementerian Kesehatan memasukkan aspek kesehatan dalam kriteria wilayah tertinggal, atau beberapa kementerian lain juga mengaitkan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Hal

yang paling penting adalah bagaimana cara mengimplementasikan program pembangunan wilayah tertinggal.

Umumnya daerah tertinggal merupakan wilayah yang memiliki kendala geografis, di antaranya sulit dijangkau oleh jaringan transportasi, listrik, dan komunikasi. Berdasarkan data potensi desa tahun 2014, rasio elektrifikasi di daerah tertinggal sebesar 81,89% lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 96,44%. Menurut Bappenas (2015) desa tertinggal yaitu desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintah yang masih minim. Secara teknis desa tertinggal merupakan desa yang memiliki Indeks Pembangunan Desa (IPD) kurang dari atau sama dengan 50.

Daerah tertinggal merupakan suatu daerah yang tingkat pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya tertinggal atau kurang berkembang dari daerah lain (Syamsuri 2014). Dengan berbagai persoalan yang dialami oleh daerah tertinggal, di antaranya sumber daya alam yang terbatas, sumber daya manusia yang rendah, sarana dan prasarana sangat terbatasnya seperti sarana transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya serta kemiskinan. Dengan demikian dibutuhkan suatu model kebijakan/program pembangunan yang diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan di daerah tertinggal. Model yang dimaksud disesuaikan dengan karakteristik, potensi dan persoalan yang dialami oleh daerah tersebut.

Lebih lanjut (Syamsuri 2014) mendefinisikan daerah tertinggal sebagai suatu daerah yang relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lainnya berdasarkan kondisi dan fungsi inter dan intraspasial, baik pada aspek alam yang meliputi sumber daya alam, sumber daya fisik, ekologi, dan ekosistemnya, maupun aspek manusianya yang meliputi dimensi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan prasarana pendukungnya. Desa terisolir merupakan desa yang memerlukan pemihakan dari pemerintah pusat karena masih minimnya berbagai sarana dan prasarana serta pelayanan dasar di wilayah tersebut. Keterisoliran desa tersebut diukur berdasarkan kriteria infrastruktur, aksesibilitas, dan jangkauan pelayanan publik. Desa yang terisolir memiliki kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi perdesaan yang tergolong masih rendah (Darmawan 2018).

Beberapa dari daerah tertinggal terhambat perkembangannya yang disebabkan oleh miskinnya sumber daya, baik sumber daya alam

maupun sumber daya manusia. Rendahnya potensi sumber daya alam mengakibatkan masyarakat sulit untuk mendapatkan mata pencaharian yang memadai. Demikian pula rendahnya sumber daya manusia mengakibatkan sulitnya masyarakat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada.

Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan daerah tertinggal berbeda dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal cakupan pembangunannya. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keamanan, bahkan menyangkut hubungan antara daerah tertinggal dengan daerah maju. Kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal, memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah (Syahza dan Suarman 2014).

### **Karakteristik Sarana dan Prasarana**

Keberadaan sarana dan prasarana transportasi menjadi penting sebagai penghubung antarwilayah, antarpulau, antardaerah, hingga antardesa. Sarana dan prasarana transportasi juga memiliki fungsi penting sebagai penghubung dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan mempersatu wilayah Indonesia. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi di tingkat desa menjadi penting untuk mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah desa pedalaman dan terisolir (Darmawan 2018).

Ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tertinggal umumnya kurang memadai. Sarana dan prasarana transportasi yang minim mengakibatkan masyarakat sulit mengakses wilayah lain, sehingga kondisi perekonomian tertinggal dibanding wilayah lain. Terutama jika secara spasial masyarakatnya menyebar dan terpencar-pencar dengan jarak antarsatu desa dengan desa lainnya cukup jauh. Tingkat aksesibilitas yang rendah tentunya akan menyulitkan terjadinya interaksi antardaerah (Farida 2013).

Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu cara untuk mendorong perekonomian perdesaan adalah melalui aksesibilitas. Aksesibilitas dapat

didefinisikan sebagai tingkat kemudahan untuk mencapai atau mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan. Aksesibilitas yang tinggi dapat terwujud dengan adanya ketersediaan prasarana (jaringan jalan) yang baik dan didukung dengan ketersediaan sarana atau fasilitas untuk melakukan pergerakan. Aksesibilitas yang tinggi ini juga dapat diukur berdasarkan jarak lokasi ke pusat-pusat pelayanan publik yang secara spasial identik dengan pusat kota (Farida 2013). Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat pertumbuhan wilayah, menyebabkan belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) (Soleh 2017).

Sarana dan prasarana transportasi desa sangat dibutuhkan, khususnya untuk desa terisolir. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi di desa terisolir bukan hanya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, namun juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang harus diselesaikan. Secara umum, beberapa permasalahan dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana desa, khususnya di desa terisolir yakni, *pertama*, keberadaan sarana dan prasarana transportasi desa belum sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang menyebabkan tingkat keterisolasian masyarakat desa dari akses pendidikan, ekonomi dan kesehatan yang masih relatif tinggi. *Kedua*, masih terbatasnya akses masyarakat desa terhadap pasar, modal, dan sumber daya lainnya dalam pengembangan produk unggulan. *Ketiga*, masih terbatasnya partisipasi pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bidang transportasi desa (Darmawan 2018).

Lebih lanjut, Farida (2013) mengemukakan bahwa dalam kawasan perdesaan, aksesibilitas memiliki peranan yang penting. Keberadaan aksesibilitas ini dapat memicu tumbuhnya pasar dan pusat pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah desa. Kemudahan aksesibilitas dapat mewujudkan kemudahan interaksi suatu desa dengan desa lainnya. Dengan kemudahan aksesibilitas, produktivitas pertanian juga akan meningkat. Namun dengan berkembangnya aktivitas di daerah perdesaan dengan aksesibilitas tinggi, terutama di pusat pertumbuhan desa menyebabkan karakteristik sosial ekonominya menjadi berbeda, lebih cenderung berkembang dan bersifat seperti kawasan perkotaan.

Dalam ruang perdesaan, aksesibilitas sangat terkait dengan kebutuhan dasar yang secara tidak langsung berhubungan dengan aspek kesejahteraan sosial dan ekonomi. Aksesibilitas dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat

desa untuk menjangkau sumber-sumber daya produktif yang meliputi modal, informasi, serta sarana produksi dan pasar (Setiawan 2006). Akses riil masyarakat desa terhadap sumber-sumber produktif tersebut diduga semakin meningkat seiring dengan membaiknya jaringan jalan dan sarana angkutan (transportasi). Pentingnya sistem transportasi di perdesaan, menjadikan aksesibilitas sebagai salah satu penentu dalam pembangunan perdesaan. Dengan meningkatnya perkembangan transportasi dan aksesibilitas, dapat memperbaiki perekonomian di daerah perdesaan (Farida 2013).

Faktor aksesibilitas secara umum berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Farida 2013). Faktor aksesibilitas dapat berpengaruh dan dapat memprediksikan kondisi sosial ekonomi masyarakat perdesaan. Namun, pengaruh tersebut masih tergolong lemah. Hal ini disebabkan masih banyaknya faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat perdesaan. Salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pergerakan masyarakat perdesaan dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, sebagian besar masyarakat perdesaan hanya melakukan pergerakan ke lokasi yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka, di samping karena kebiasaan masyarakat yang seringkali lebih memilih berjalan kaki untuk mencapai lokasi aktivitas mereka. Lemahnya aksesibilitas terhadap kondisi sosial ekonomi juga disebabkan karena banyaknya tengkulak yang langsung membeli hasil produksi masyarakat di dekat rumah tinggal masing-masing keluarga, sehingga petani tidak perlu bersusah payah untuk menjual hasil produksinya ke pasar.

### **Karakteristik Sumber Daya Pertanian**

Sumber daya alam di wilayah tertinggal, dapat dikategorikan: (1) tidak memiliki potensi dan (2) memiliki sumber daya alam besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi sehingga tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Hasil penelitian Muchtar et al. (2011) menunjukkan bahwa desa di wilayah Kecamatan Air Besar (Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat), umumnya masuk kategori tertinggal. Secara geografis, lokasinya jauh dari Ibu Kota Kabupaten Landak (Provinsi Kalimantan Barat) (sekitar 200 km). Kehidupan masyarakat umumnya bergantung pada hutan, di mana baru sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk

perkebunan karet dan sawit. Sementara itu, sungai baru dimanfaatkan untuk alternatif sarana transportasi dan mencari ikan (memancing, perangkap ikan).

Dari perspektif wilayah, kawasan yang merupakan kantong-kantong kemiskinan dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu kawasan tertinggal dan kawasan terbelakang. Kawasan tertinggal adalah suatu wilayah yang cukup lama dikembangkan bersama-sama dengan wilayah yang lain tetapi karena berbagai sebab kawasan tersebut tetap belum dapat berkembang seperti yang diharapkan, sehingga kehidupan sosial ekonomi penduduknya tetap rendah. Salah satu penyebab utama karena terbatasnya potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kawasan terbelakang adalah suatu kawasan yang sebetulnya cukup menyimpan potensi dan sumber daya, tetapi belum sempat dikembangkan dan ditangani secara sungguh-sungguh sehingga perkembangan sosial ekonomi masyarakatnya rendah dan mayoritas berada dalam kondisi kemiskinan (Muchtart et al. 2011).

Petani Papua sebagian besar melakukan kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga (*subsistence farming*), hanya sebagian kecil yang mempunyai akses pasar (Herman 2008). Komoditas pangan lokal yang ditanam adalah padi, sagu, jagung, ubi-ubian, dan sayur-sayuran. Usaha tani padi sawah umumnya dilakukan oleh petani transmigran, sementara petani lokal menanam padi ladang dengan pola perladangan berpindah (*shifting cultivation*). Varietas padi sawah yang dominan ditanam adalah Ciherang, dengan benih berasal dari pertanaman sendiri tanpa seleksi benih, sehingga hasil padi rendah. Jenis dan takaran pupuk yang diberikan jauh lebih rendah dari rekomendasi. Petani memperoleh hasil sebesar 2,5–3,0 ton/ha untuk padi musim tanam (MT) I dan 2,2–2,5 ton/ha untuk MT II. Tingkat harga pupuk yang mahal tidak sebanding dengan harga jual gabah/beras di perdesaan.

Padi ladang terluas (578 ha) juga terdapat di Kabupaten Manokwari dan diikuti oleh Kabupaten Kaimana seluas 200 ha. Ada kecenderungan luas panen padi sawah meningkat sedangkan untuk padi gogo terjadi kecenderungan menurun. Provinsi Papua Barat memproduksi gabah sekitar 27.500 ton per tahun. Produksi beras meningkat cukup pesat (5,1–14,4%) tetapi belum bisa diterima oleh Depot Logistik (Dolog) karena kualitas beras kurang baik.

Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal disebabkan oleh kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa. Sumber daya alam yang ada di desa berupa: (1) lahan, tidak hanya sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga sebagai sumber bahan tambang dan mineral. Lahan memiliki jenis tanah yang menjadi media bagi tumbuhnya tanaman tertentu, (2) tanah, mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya, misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral, (3) air, pada umumnya desa memiliki potensi air yang bersih dan melimpah, (4) iklim, sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat memengaruhi setiap daerah. Aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya alam pada wilayah tertinggal relatif terbatas (Soleh 2017).

Desa Patoameme (sebagai salah satu desa tertinggal di Kecamatan Botumito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo) tidak memiliki sumber daya alam seperti bahan-bahan tambang atau hasil hutan (Murni 2014). Sumber andalan yang ada saat ini dari kelapa dan usaha tani jagung. Hampir seluruh tanah pertanian di Patoameme merupakan lahan tadah hujan, oleh karena itu kegiatan pertanian sangat tergantung pada kondisi musim. Wilayah kawasan timur Indonesia lainnya yang tergolong tertinggal dan termasuk yang termiskin di Indonesia adalah Provinsi Papua Barat. Kemiskinan terutama di sektor pertanian terjadi karena keterbatasan infrastruktur, belum berkembangnya kelembagaan pertanian, terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, rendahnya investasi, belum berkembangnya agroindustri, dan sistem pemasaran yang belum efektif. Hasil analisis SWOT membuktikan bahwa Papua Barat mempunyai potensi dan peluang keberhasilan pembangunan pertanian, di samping banyaknya kelemahan dan ancaman. Potensi lahan untuk pertanian seluas 2,7 juta ha, baru dimanfaatkan sekitar 33% (Herman 2008).

### **Karakteristik Sumber Daya Manusia**

Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan sumber daya alam yang tersedia, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sektor pertanian di wilayah tertinggal merupakan sektor yang dominan bagi perekonomian wilayah. Sumber daya manusia sebagai penggerak utama usaha pertanian adalah petani beserta kelompoknya.

Kemajuan sektor pertanian sangat bergantung pada kualitas petani dan kelompoknya. Kondisi riil di wilayah tertinggal menunjukkan bahwa kualitas petani dan kelompok tani masih rendah, baik dalam hal pendidikan formal, pengetahuan, maupun kemampuannya dalam menyerap dan mengadopsi teknologi maju bidang pertanian. Tingkat pendidikan, keterampilan dan semangat hidup merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan pertanian. Masyarakat di perdesaan memiliki ciri semangat kegotongroyongan dengan ikatan kekeluargaan yang erat (*gemeinschaft*) dan kokoh bagi kelangsungan program pembangunan dan merupakan kekuatan modal sosial dalam membangun perdesaan, utamanya sektor pertanian. Rendahnya produktivitas masyarakat di perdesaan juga merupakan permasalahan dalam pembangunan pertanian di perdesaan (Soleh 2017).

Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan pembangunan pertanian adalah ketersediaan SDM yang terampil yang merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Kecepatan proses pembangunan tergantung kepada kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Untuk mengelola sumber daya alam diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai. Sebagian besar petani di wilayah tertinggal kurang bisa dan mampu menerima perubahan terutama di bidang teknologi alat dan mesin pertanian dan teknologi informasi, selain itu petani juga kurang bisa mengakses permodalan dan inovasi teknologi pertanian (Windari 2021).

Sebagian besar masyarakat di wilayah tertinggal seperti di Desa Patoameme, berpendidikan rendah, setingkat SD dan hanya sebagian kecil berpendidikan SLTP dan SLTA. Bahkan masih ada golongan kecil penduduk yang masih buta aksara (hanya bisa menulis dan membaca huruf Arab), terutama pada golongan usia 60 tahun ke atas. Selain itu, keterampilan yang dimiliki masyarakat belum banyak memberikan kontribusi peningkatan penghasilan (Murni 2014).

Tingkat harapan hidup penduduk Papua Barat tidak jauh berbeda dari rata-rata nasional, yaitu 67 tahun. Rata-rata lama sekolah mencapai 7,2 tahun dan > 85% penduduk melek huruf latin. Pengeluaran riil per kapita jauh di bawah garis kemiskinan senilai US\$1,00 per hari yaitu sekitar Rp585.000 per tahun atau rata-rata Rp 1.600 (US\$ 0,18) per hari. Indeks pembangunan manusia (IPM) rata-rata Papua Barat sekitar 66,1 pada tahun 2006. Secara nasional peringkat IPM Kabupaten di Papua Barat berkisar antara 286

sampai 433 dari sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia. Peringkat IPM Provinsi Papua Barat menunjukkan ranking terendah di Indonesia. Penduduk yang sangat jarang, berkisar (10–14,7) jiwa/km dan tingkat teknologi yang sangat sederhana, menyebabkan pertanian umumnya dilakukan secara tradisional dan ekstensif. Intensifikasi pertanian hanya dapat dilakukan melalui program transmigrasi dan mekanisasi pertanian untuk memenuhi jumlah masa kritis (*critical mass*) pembangunan pertanian. Jumlah kepala keluarga (KK) petani Papua Barat sebanyak 181.201 orang, yang bergerak di bidang tanaman pangan (padi dan palawija) hanya sekitar 104.058 orang (57%), yang mengusahakan tanaman perkebunan berjumlah 30.805 orang (17%) dan di bidang tanaman hortikultura berjumlah 46.338 orang atau 26% (Herman 2008).

## Petani

Beberapa aspek yang menyebabkan kapasitas petani rendah di antaranya adalah aspek manajerial, teknis, dan sosial. Peningkatan kapasitas petani perlu dilakukan agar petani mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan untuk kesejahteraan petani. Hasil penelitian Rustandi et al. (2020) menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas petani adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, lama usaha, dan keikutsertaan dalam kegiatan penyuluhan. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas petani diupayakan melalui peningkatan kapasitas kelompok tani sebagai wahana belajar, sehingga memungkinkan petani dapat bekerja sama dengan petani lain untuk menghasilkan produk pertanian. Selain itu petani juga dapat memperoleh informasi secara intensif dan berkelanjutan yang terkait dengan inovasi, teknologi dan pasar.

Tingkat kapasitas petani di daerah tertinggal tergolong rendah, baik dilihat dari pengetahuan petani terhadap aspek lingkungan pertanian, keterlibatan petani dalam organisasi petani, maupun pengalaman petani dalam mengimplementasikan program pembangunan pertanian (Indraningsih et al. 2015). Petani di wilayah tertinggal tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang peraturan pertanian seperti kebebasan memilih jenis tanaman yang dibudidayakan, adanya undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Keterbatasan jumlah penyuluh menyebabkan intensitas kegiatan penyuluhan relatif rendah, itu pun terbatas pada kegiatan pendampingan program pertanian.

Pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki petani yang terkait dengan aspek teknis pertanian tergolong sedang. Pengetahuan dan keterampilan petani tentang pengolahan tanah, perbenihan/pembibitan, penanaman, pemupukan, pengendalian hama penyakit, dan panen telah diperoleh secara turun temurun. Keikutsertaan petani, penilaian petani, formulasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut pengembangan dalam peningkatan kapasitas petani tergolong rendah.

Faktor-faktor yang secara nyata berpengaruh positif terhadap keikutsertaan petani dalam peningkatan kapasitas petani adalah hubungan petani dengan pemegang kekuasaan, manfaat utama keikutsertaan petani dalam organisasi, pengalaman petani dalam implementasi program pembangunan pertanian, dan keterampilan petani dalam penerapan teknis pertanian. Faktor-faktor yang secara nyata berpengaruh positif terhadap keikutsertaan petani dalam monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas petani di lokasi penelitian adalah pengetahuan petani tentang peraturan pertanian, hubungan petani dengan kekuasaan, keikutsertaan petani dalam organisasi petani, pengalaman petani dalam implementasi program pembangunan pertanian, dan pengetahuan petani tentang aspek teknis pertanian.

Semakin erat hubungan petani dengan pemimpin formal seperti kepala desa, aparat desa/pamong, pemimpin informal seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, ataupun petugas dinas teknis maka kecenderungan petani untuk ikut dalam peningkatan kapasitas petani, semakin tinggi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya sikap adaptif petani, dominasi kepentingan politik praktis, dan ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah (Indraningsih et al. 2015). Sebagai contoh di wilayah Papua Barat, hasil penelitian Herman (2008) menyatakan bahwa total kepala keluarga (KK) petani sebanyak 181.201 orang, yang bergerak di bidang tanaman pangan (padi dan palawija) sekitar 104.058 orang (57%), yang mengusahakan tanaman perkebunan berjumlah 30.805 orang (17%) dan di bidang tanaman hortikultura berjumlah 46.338 orang (26%). Apabila petani memiliki kedekatan hubungan dengan kepala desa, sangat mungkin anggaran dana desa dapat dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan petani, yang merupakan salah satu program prioritas Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Menurut Aminah (2015), untuk meningkatkan kapasitas petani kecil diperlukan peran pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan

perlu dilakukan secara partisipatif agar petani memiliki kapasitas pada aspek kemampuan manajerial usaha tani, kemampuan meningkatkan skala usaha tani, dan kemampuan teknik budi daya. Kondisi tersebut perlu didukung dengan jumlah penyuluh pertanian yang memadai disertai peningkatan kompetensi mereka, serta adanya pemberian insentif yang layak sebagai pendamping petani. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses petani dalam memperoleh *input* produksi, fasilitas kredit, dan pemasaran yang menjangkau luar daerah. Upaya lain adalah pemberian insentif bagi petani untuk mengembangkan diversifikasi usaha selain bertani. Perlu membangun kemitraan antarpetani dengan mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung usaha tani, baik dengan pemerintah, pedagang atau pengusaha, koperasi, maupun lembaga keuangan formal lain.

Kelembagaan petani yang efektif diharapkan mampu memberi kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kemandirian dan martabat petani. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dilakukan sejalan dengan kegiatan penyuluhan pertanian dengan memotivasi petani untuk berpartisipasi dalam kelembagaan petani. Penyuluhan pertanian perlu dirancang dengan memberikan muatan (*content area*) pada penguatan kapasitas individu petani sekaligus penguatan kapasitas kelembagaan petani.

Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan, terutama pemerintah adalah (a) meningkatkan kapasitas para penyuluh lapangan, (b) menggunakan cara-cara atau pendekatan partisipatif yang berorientasi pada kebutuhan petani dalam melakukan kegiatan penyuluhan, dan (c) memperkuat kelembagaan penyuluhan (Anantanyu 2011). Hasil penelitian Khairunnisa et al. (2019) menunjukkan bahwa petani setuju kelembagaan petani berfungsi sebagai penguatan struktur kelembagaan petani, peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis dan peningkatan kemampuan kelembagaan petani dalam menjalankan fungsinya.

Salah satu pelaku dalam kelembagaan petani yang selama ini sering tidak diperhitungkan dalam proses pembangunan pertanian negara-negara berkembang adalah wanita tani. Kenyataan di banyak negara berkembang bahwa wanita tani memainkan peran penting dari usaha tani. Demikian juga di wilayah tertinggal, banyak kegiatan usaha tani yang menjadi domain wanita, sehingga diperlukan peningkatan kapasitasnya. Membangun dan meningkatkan kapasitas

merupakan jantung dari pembangunan di perdesaan. Oleh karena itu, pemberdayaan wanita dalam pembangunan pertanian wilayah tertinggal menjadi strategi yang sangat penting, agar mereka mampu menjadi pelaku ekonomi yang produktif (Chaikaire et al. 2015). Menurut Koojiman (2021) bahwa wanita dan petani kecil perlu memperoleh pendidikan nonformal untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, agar bisa tumbuh sebagai petani yang kuat dan mandiri. Peningkatan kapasitas wanita tani akan meningkatkan kontribusi mereka dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di wilayah tertinggal.

### Kelompok Tani

Dalam upaya mengakselerasi pembangunan pertanian dibutuhkan sumber daya manusia pertanian yang profesional. Sumber daya manusia pertanian terdiri dari: aparatur/petugas lingkup pertanian pusat dan daerah; pelaku utama (petani, peternak, dan pekebun); serta pelaku usaha lainnya. Sumber daya manusia pertanian yang profesional, dapat dibangun antara lain dengan upaya peningkatan kapasitas aparatur (antara lain penyuluh) dan nonaparatur (antara lain petani). Petani memiliki potensi yang dapat dikembangkan, melalui peningkatan kapasitas diharapkan dapat mendorong, memotivasi, dan menimbulkan kesadaran petani terhadap potensi tersebut

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pembangunan sumber daya manusia, dalam hal ini petani dan kelembagaan kelompok tani, menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam upaya meningkatkan kemampuan mereka dalam menggerakkan pembangunan pertanian di wilayah tertinggal. Selain itu peran kelembagaan penyuluhan dan pendampingan merupakan salah satu strategi dalam menguatkan kapasitas petani dan kelompok tani, sehingga mereka mampu menjadi pelaku ekonomi yang produktif sekaligus sebagai penggerak pembangunan sektor pertanian. Peningkatan kapasitas petani dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis, kewirausahaan, kepemimpinan dan manajemen. Model diklat dapat dilakukan dengan program pemberdayaan (pendampingan), sekolah lapang, magang, kursus tani, dan kunjungan.

Pemikiran tersebut didukung oleh hasil penelitian Rustandi et al. (2020) bahwa dalam menentukan strategi peningkatan kapasitas petani dapat dilakukan dengan cara meningkatkan fungsi kelompok tani sebagai tempat pembelajaran, kerja sama dan unit produksi, mengakses informasi baik inovasi

teknologi maupun pasar. Melalui kegiatan penyuluhan diharapkan akan ada perubahan perilaku yang terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani.

Nuryanti dan Swastika (2011), mengungkapkan bahwa awal pembentukan kelompok tani di Indonesia pada era Orde Baru didasari atas semangat ingin memperkuat diri dalam hal posisi tawar (*bargaining power*), terutama dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil secara kolektif. Namun saat ini terjadi perubahan yang sangat mendasar. Kelompok tani tidak lagi dibentuk atas inisiatif petani berdasarkan kepentingan bersama untuk memperkuat diri, melainkan merupakan respons dari program-program bantuan pemerintah yang mengharuskan petani berkelompok. Program-program pemerintah seperti: bantuan atau subsidi sarana produksi, kredit usaha tani bersubsidi, bantuan alsintan, penyuluhan teknologi pertanian dan sebagainya disalurkan melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani (gapoktan). Petani yang ingin mendapat berbagai layanan atau bantuan pemerintah harus menjadi anggota kelompok tani. Dengan demikian, pembentukan kelompok tani didasarkan atas keinginan mendapat bantuan pemerintah. Tidak ada aktivitas untuk memperkuat posisi tawar, seperti pembelian sarana produksi dan pemasaran hasil secara kolektif. Petani tetap melakukan pembelian sarana produksi dan memasarkan hasil secara individu.

Sesungguhnya, bila berfungsi dengan baik, kelembagaan kelompok tani bisa berfungsi memperkuat posisi tawarnya. Seperti diungkapkan oleh Hamilton et al. (2015) mengemukakan bahwa kelompok tani sebagai wadah kerja sama dapat membuat petani menjadi bertambah kuat dalam upaya meningkatkan keuntungan dan mencegah terjadinya kerugian. Dengan demikian usaha pertanian menjadi lebih menguntungkan dan mempunyai daya saing sehingga mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan menjadikan petani yang mandiri. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Frese dan Gielnik (2014) bahwa kelembagaan petani dan tindakan kolektif sering dilihat sebagai faktor kunci dalam meningkatkan akses petani ke pasar. Demikian juga Schmidt et al. (2015) yang menyatakan bahwa kondisi struktural petani merupakan dampak karakteristik kelompok petani.

Kelas kelompok tani pemula masih mendominasi di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok di antaranya di Nagari Alahan Panjang (53%), Nagari Salimpek (64%), Nagari Sungai Nanam (61%), dan Nagari Aie Dingin

(62,5%) (Veronice et al. 2018). Studi awal juga menemukan banyaknya indikator penilaian yang belum terpenuhi oleh kelompok tani, terutama dalam aspek manajemen berupa ketidaklengkapan administrasi kelompok seperti buku kelompok yang tidak lengkap, jadwal pertemuan yang tidak konsisten, sehingga partisipasi pengurus dan anggota dalam kegiatan kelompok belum tampak.

Kondisi kelompok tani dari tahun ke tahun belum mengalami perkembangan seperti yang diharapkan atau tetap, bahkan cenderung menurun. Sebagian besar kelas kelompok tani tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti status kelas kemampuan kelompok tani yang tinggi (misalnya madya atau utama), namun bila diukur dengan skor penilaian ternyata dinamika kegiatannya masih rendah. Bahkan sekarang ini, ada sebagian kelompok tani sudah bubar, namun masih terdaftar di dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Kondisi tersebut terjadi karena kelompok tani sering dijadikan sebagai alat atau wadah untuk penyaluran bantuan/subsidi yang berkaitan dengan program pemerintah. Oleh karena itu, pembentukan dan penumbuhan kelompok tani banyak dilakukan karena adanya proyek-proyek, dan dengan berakhirnya proyek kelompok tani tidak berfungsi atau tinggal nama saja.

Penguatan kelompok tani mitra berada pada kriteria tinggi, partisipasi dan motivasi pemuda tani berada pada kategori sedang (Nazaruddin dan Anwarudin 2019). Partisipasi pemuda tani dipengaruhi oleh persepsi, akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penguatan kelompok tani, dan partisipasi dalam kegiatan pertanian. Keberadaan kelembagaan petani bagi petani sudah menjadi keniscayaan untuk memperbaiki taraf hidup, harkat dan martabatnya. Kelembagaan petani harus ditempatkan sebagai sarana untuk mewujudkan harapan, keinginan, dan pemenuhan kebutuhan petani. Menurut Wilhemina et al. (2010), bahwa konsep organisasi, dalam hal ini kelompok tani yang berbasis kepentingan petani dapat berfungsi sebagai alat untuk mengkonsolidasi kekuatan petani secara kolektif dalam pertanian berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan partisipasi petani secara kolektif, sehingga tumbuh penguatan diri yang berkelanjutan dari kelompok tani tersebut.

Penguatan kelompok yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan kelompok dalam hal memahami kekuatan (potensi) dan kelemahan (masalah) kelompok, memperhitungkan peluang dan tantangan yang

dihadapi, memilih berbagai alternatif pemecahan masalah dan menyelenggarakan kehidupan berkelompok yang serasi dengan lingkungannya secara berkesinambungan (Hermanto dan Swastika 2011). Tingkat kapasitas kelembagaan kelompok tani dipengaruhi secara langsung oleh tingkat kedinamisan kelompok tani dan tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok tani, serta secara tidak langsung dipengaruhi oleh kapasitas anggota, peran ketua, peran penyuluh, dukungan pihak luar, dan karakteristik individu anggota (Ruhimat 2017). Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani adalah dengan meningkatkan kedinamisan kelompok tani dan partisipasi anggota dalam setiap kegiatan kelompok tani.

Penyebaran penyuluh di Provinsi Papua Barat belum merata (Heman 2008). Kabupaten Sorong Selatan yang memiliki luas wilayah 29.811 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 59.240 jiwa, hanya memiliki tiga orang penyuluh dan 12 kelompok tani. Sementara itu, Kabupaten Manokwari dengan luas wilayah 14.448 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 166.322 jiwa, memiliki 112 orang penyuluh dan 378 kelompok tani. Rendahnya kelas kelompok tani yang ada merupakan kendala bagi penyuluhan. Dari 962 kelompok tani yang ada, sekitar 84% berada pada kelas prapemula dan pemula. Papua Barat belum mempunyai Balai Latihan Penyuluhan Pertanian (BLPP), sehingga berbagai pelatihan bagi penyuluh atau petani masih dilakukan di BLPP Jayapura, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Manokwari, atau bahkan di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

#### **FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENINGKATKAN KAPASITAS PETANI DAN KELOMPOK TANI DI WILAYAH TERTINGGAL**

Persoalan penduduk di daerah tertinggal tidak hanya persoalan lokal, namun merupakan persoalan bersama (nasional). Dengan demikian, diperlukan perhatian dari berbagai pihak terkait seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota), dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memberdayakan dan mengembangkan sumber daya manusianya. Melalui upaya tersebut diharapkan masyarakat daerah tertinggal terentaskan dari ketertinggalannya secara bertahap. Dalam kerangka itu, identifikasi kebutuhan, sumber daya, dan permasalahan masyarakat daerah tertinggal penting dilakukan (Muchtar et al. 2011).

## Institusi Pemerintah

Secara umum konsep peningkatan kapasitas atau *capacity building* dapat dimaknai sebagai proses membangun kapasitas individu, kelompok, atau organisasi. *Capacity building* dapat juga diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi dan bakat, serta penguasaan kompetensi. Dengan demikian, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga. *Capacity building* dapat pula dimaknai sebagai proses kreatif dalam membangun kapasitas yang belum nampak. Menurut Milen (2004), pengertian mengenai karakteristik dari pengembangan kapasitas merupakan proses peningkatan terus menerus (berkelanjutan) dari individu, organisasi atau institusi, tidak hanya terjadi satu kali. Ini merupakan proses internal yang hanya bisa difungsikan dan dipercepat dengan bantuan dari luar sebagai penyumbang (donator).

Menurut Fiszbein (1997), dimensi peningkatan kapasitas difokuskan pada: (1) kemampuan tenaga kerja, (2) kemampuan teknologi yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau kelembagaan, dan (3) kemampuan capital yang diwujudkan dalam bentuk dukungan sumber daya, sarana, dan prasarana. Eade (1998) merumuskan peningkatan kapasitas dalam tiga dimensi, yaitu (1) individu, (2) organisasi, dan (3) jaringan kerja. Pengembangan dimensi individu dan organisasi merupakan kunci utama atau titik strategis bagi perbaikan kinerja (Mentz 1997). Masuknya dimensi jaringan kerja juga sangat penting karena melalui dimensi ini individu dan organisasi dapat belajar mengembangkan diri dan berinteraksi dengan lingkungannya.

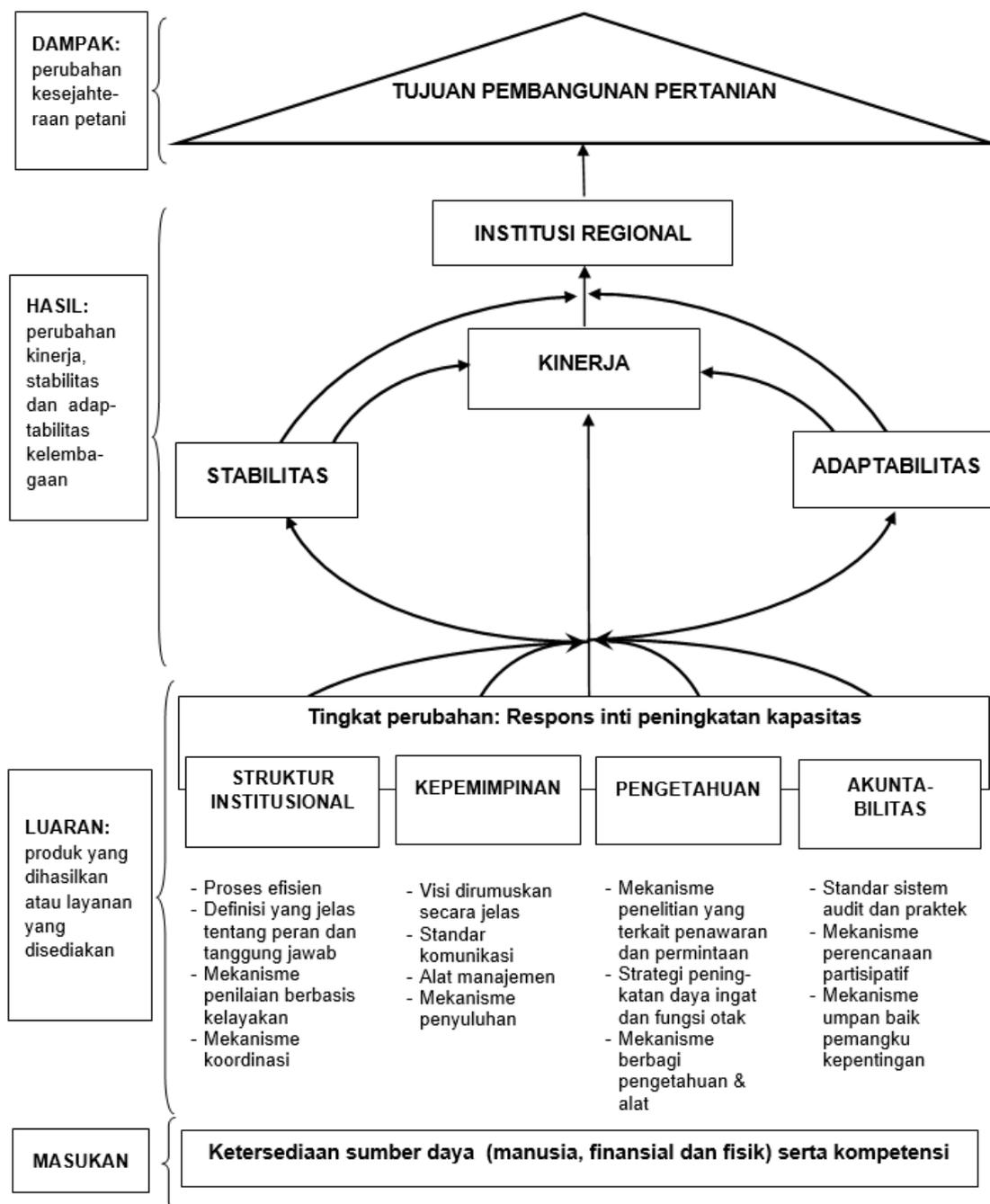
World Bank dalam Edralin (1997) memfokuskan peningkatan kemampuan kepada: (1) pengembangan sumber daya manusia, khususnya melalui pelatihan, rekrutmen, pemanfaatan dan pemberhentian tenaga kerja profesional, manajerial dan teknis, (2) organisasi, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya, dan gaya manajemen, (3) jaringan kerja interaksi organisasi, yaitu koordinasi kegiatan-kegiatan organisasi, fungsi jaringan kerja, dan interaksi formal dan informal, (4) lingkungan organisasi, yaitu aturan dan perundang-undangan yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menghambat tugas-tugas pembangunan, dan dukungan keuangan dan anggaran, dan (5)

lingkungan kegiatan yang luas, yaitu mencakup faktor politik, ekonomi, dan kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap kinerja.

United Nations Development Programme (UNDP) memfokuskan pada tiga dimensi yaitu (1) tenaga kerja (kualitas dan cara pemanfaatan SDM), (2) modal (dimensi fisik) yaitu menyangkut peralatan, bahan-bahan yang diperlukan, dan gedung, dan (3) teknologi yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, pembuatan keputusan, pengendalian dan evaluasi, serta sistem informasi manajemen. United Nations memusatkan perhatiannya kepada: (1) mandat atau struktur legal, (2) struktur kelembagaan, (3) pendekatan manajerial, (4) kemampuan organisasi dan teknis, (5) kemampuan fiskal lokal, dan (6) kegiatan-kegiatan program (Edralin 1997).

Pengembangan sumber daya manusia misalnya, dapat dilihat sebagai suatu strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan memelihara nilai-nilai moral dan etos kerja. Pengembangan kelembagaan merupakan strategi penting agar suatu lembaga pemerintahan mampu: (1) menyusun rencana strategis ditujukan agar organisasi memiliki visi yang jelas, (2) memformulasikan kebijakan dengan memperhatikan nilai efisiensi, efektivitas, transparansi, responsivitas, keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan, (3) mendesain organisasi untuk menjamin efisiensi dan efektivitas, tingkat desentralisasi dan otonomi yang lebih tepat, dan (4) melaksanakan tugas-tugas manajerial agar lebih efisien, efektif, fleksibel, adaptif, dan lebih berkembang. Pengembangan jaringan kerja merupakan strategi untuk meningkatkan kemampuan bekerja sama atau kolaborasi dengan pihak-pihak luar dengan prinsip saling menguntungkan (Pratama et al. 2014).

*Capacity building* berkaitan dengan strategi menata *input* dan proses dalam mencapai *output* dan *outcome*, serta menata *feedback* untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada tahap berikutnya (Gambar 1). Strategi menata *input* berkenaan dengan kemampuan lembaga menyediakan berbagai jenis dan jumlah serta kualitas sumber daya manusia dan faktor pendukungnya untuk digunakan bila diperlukan. Strategi menata proses terkait dengan kemampuan lembaga dalam merancang, memproses dan mengembangkan kebijakan, organisasi dan manajemen. Strategi menata *feedback* berkaitan dengan kemampuan melakukan perbaikan berkesinambungan dengan mempelajari hasil yang dicapai, kelemahan-kelemahan *input* dan proses, serta



Sumber: UNDP (2010)

Gambar 1. Kerangka pemikiran peningkatan kapasitas (petani dan kelompok tani)

mencoba melakukan tindakan perbaikan secara nyata setelah melakukan berbagai penyesuaian dengan lingkungan.

Tingkat kelayakan dari keseluruhan strategi tersebut perlu dinilai dengan cermat pada bidang-bidang strategis yang menjadi prioritas utama kegiatan pemerintahan pada saat sekarang. Dengan demikian, kebijakan akselerasi pembangunan wilayah tertinggal

dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas petani, sebagai pelaku utama usaha tani (Pratama et al. 2014; UNDP 2010).

### Pemerintah Pusat

Terdapat dua pandangan untuk menangani daerah tertinggal, *pertama*: pandangan yang dilandasi pertimbangan dan perhitungan ekonomis, yang menyarankan agar investasi

dipusatkan pada wilayah-wilayah yang berpotensi tinggi dengan alasan lebih cepat memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan *Gross National Product* (GNP). *Kedua*: didasari pada pertimbangan sosial politik, yang merekomendasikan demi keadilan, investasi dilakukan tidak hanya untuk daerah yang berpotensi tinggi tetapi juga di daerah berpotensi sedang dan rendah. Sementara itu, bagi upaya pengembangan kawasan terbelakang dimana mayoritas penduduknya dalam kondisi kemiskinan karena belum banyak upaya untuk memanfaatkan dan mendayagunakan potensi dan sumber daya yang ada, maka strategi pengembangan kawasan ini adalah dengan cara meningkatkan pendayagunaan potensi dan sumber daya yang ada, baik melalui investasi bagi eksploitasi dan eksplorasi sumber daya maupun investasi bagi pembangunan sarana prasarana pendukungnya. Pada dasarnya strategi ini dibedakan menjadi dua: (1) pendayagunaan potensi yang belum dilakukan, (2) optimalisasi potensi yang sebelumnya telah dilakukan (Muchtari et al. 2011).

Pembangunan daerah tertinggal perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing (Bappenas 2015). Setidaknya dapat dilakukan melalui strategi: (a) pengembangan ekonomi lokal, yang diarahkan pada pengembangan ekonomi daerah tertinggal berdasarkan pendayagunaan potensi sumber daya lokal (sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, dan sumber daya fisik) yang dimiliki masing-masing daerah, oleh pemerintah dan masyarakat, melalui pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok kelembagaan berbasis masyarakat yang ada, (b) pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik, (c) perluasan kesempatan, strategi ini bertujuan untuk membuka keterisolasian daerah tertinggal sehingga memiliki keterkaitan dengan daerah maju, (d) peningkatan kapasitas yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia tertinggal, dan (e) peningkatan mitigasi dan rehabilitasi yang diarahkan untuk mengurangi risiko dan memulihkan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh konflik dan bencana alam serta berbagai aspek dalam wilayah perbatasan.

Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, namun juga aspek sosial-budaya. Sehingga pengembangan aspek sosial-budaya lokal masyarakat daerah tertinggal perlu mendapat perhatian secara proporsional dari pemangku kepentingan sebagai dua sisi

yang saling melengkapi. Pengembangan aspek sosial-budaya menjadi pemicu perkembangan aspek ekonomi suatu masyarakat. Hal ini sering terjadi dan banyak contohnya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal menjadi prioritas pilihan.

### Pemerintah Daerah

Hasil penelitian Wiratama et al. (2018) menunjukkan bahwa terdapat kesamaan sektor yang memiliki potensi (basis) serta sektor yang memiliki keunggulan kompetitif di setiap wilayah tertinggal di Provinsi Jawa Timur yaitu sektor pertanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi sektor yang mendominasi tingkat pertumbuhan PDRB di setiap wilayah tertinggal Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan ekonomi wilayah yang mendukung dalam meningkatkan kebutuhan sektor tersebut. Kebijakan ekonomi wilayah bisa berupa kebijakan distribusi hasil pertanian, perluasan lahan pertanian, perbaikan sarana prasarana yang menunjang sektor pertanian dan juga peningkatan kualitas SDM dari para petani melalui kelompok tani. Implikasi dari ketertinggalan di setiap wilayah adalah masih banyaknya sektor-sektor ekonomi yang belum berkembang di setiap wilayah tertinggal, sehingga dibutuhkan prioritas pembangunan terhadap dalam menunjang sektor yang belum berkembang. Diharapkan kemudian bahwa seluruh sektor mampu meningkat dan bersaing dengan sektor lainnya. Perekonomian lokal dapat dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja dan kemampuan memanfaatkan dan mengelola pasar.

Faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap ketertinggalan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah adanya kecamatan yang termasuk ke dalam tipologi jauh di daerah rural yaitu Kecamatan Suling Tambun dan Kecamatan Seruyan Hulu dengan rata-rata pendapatan per kapita tergolong rendah dan pertumbuhan wilayah yang sangat lambat (Sandra et al. 2020). Kelengkapan infrastruktur berdasarkan analisis *skalogram* kurang memadai. Aksesibilitas berdasarkan hasil analisis Hansen jarak tempuh kecamatan yang paling jauh ialah Suling Tambun, Seruyan Hulu jika ingin pergi ke Ibu Kota Seruyan. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan masih mengadakan anggaran dari pemerintah pusat karena pendapatan asli daerah belum mampu memenuhi kebutuhan daerahnya. Berdasarkan

analisis LQ Kabupaten Seruyan memiliki dua sektor unggulan yang terdiri dari pertanian, kehutanan, perikanan, dan industri pengolahan. Indeks kedalaman kemiskinan dari Kabupaten Seruyan selama tahun 2014 sampai tahun 2018 setiap tahunnya mengalami perubahan. Untuk itu diperlukan adanya perhatian dari pemerintah setempat khususnya Kabupaten Seruyan. Terkait dengan kecamatan yang masih terisolasi, perlu peningkatan pengelolaan kawasan pertanian dan kawasan perikanan di Kabupaten Seruyan, perlu peningkatan pendapatan per kapita khususnya di Kabupaten Seruyan. Pemerintah daerah perlu mengupayakan pengurangan angka kemiskinan, pemerataan fasilitas prasarana dan sarana ke seluruh kecamatan terutama wilayah perdesaan dan pedalaman yang akses pelayanannya sangat jauh dari Ibu Kota Seruyan. Selain itu, perlu peningkatan pendapatan daerah selain pajak dengan penyertaan investasi daerah lainnya melalui kerja sama dengan beberapa perusahaan.

### **Kelembagaan Penyuluhan**

Dasar penilaian kelas kelompok tani harus mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 25/Kpts/SM.060/I/02/18 tanggal 8 Februari 2018 (BPPSDMP 2018). Penyelenggara penyuluhan dalam melaksanakan penilaian kemampuan kelompok tani telah mengikuti pedoman tersebut. Dengan demikian, diperoleh tingkat perkembangan dan klasifikasi kemampuan kelompok tani yang mencakup aspek-aspek penilaian berupa aspek manajemen dan kepemimpinan yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan serta pengembangan kepemimpinan kelompok tani. Lima aspek penilaian tersebut dikenal dengan Panca Kemampuan Kelompok Tani (Pakem Poktan).

Kelemahan tenaga penyuluh tidak hanya dalam aspek kuantitas, tetapi juga secara kualitas cukup mengkhawatirkan. Hasil-hasil penelitian yang terkait dengan kompetensi penyuluh seperti yang dilakukan Marius et al. (2007), Nuryanto (2008), Mulyadi (2009), Veronice et al. (2015) menunjukkan masih lemahnya kompetensi penyuluh pertanian. Rendahnya mutu tenaga penyuluh juga ditegaskan oleh Slamet (2008) bahwa idealnya penyuluh lapangan itu juga harus profesional yang mampu berimprovisasi dengan inovasi dan dapat memberikan pengetahuan baru kepada petani.

Namun kenyataan di lapangan, inovasi dan motivasi yang diberikan pada petani belum memberikan perubahan pada kegiatan usaha tani seperti motivasi untuk penggunaan bahan organik, administrasi kelompok yang belum lengkap, pertemuan kelompok yang belum rutin (Veronice et al. 2018). Di sisi lain, penyuluh yang kompeten diharapkan mampu memberi pengetahuan dan keterampilan tentang inovasi teknologi pertanian yang maju, memberi pendampingan, serta memotivasi petani agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang produktif.

Berdasarkan kerangka pemikiran peningkatan kapasitas (petani dan kelompok tani) pada Gambar 1 yang diadaptasi dari UNDP (2010), bahwa untuk meningkatkan kapasitas petani dan kelompok tani diperlukan dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program peningkatan kapasitas (dalam bentuk pemberdayaan masyarakat) di daerah tertinggal perlu menjadi prioritas pemerintah.

Hal yang tidak kalah penting adalah dukungan kebijakan pemerintah daerah, mengingat kondisi saat ini dengan adanya otonomi daerah kelembagaan penyuluhan berada di dinas teknis yang bernaung di bawah pemerintah daerah. Penyuluh dalam melakukan pendampingan kepada petani dan kelompok tani memerlukan fasilitasi sarana dan prasarana (termasuk anggaran) yang memadai, agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

Menurut Ndibo dan Dartin (2020) bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan produksi padi sawah pada kelompok tani Abebeu di Kelurahan Kulahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe adalah pembinaan cara bertani yang baik (seperti: pengolahan tanah, penghamburan/pembibitan, penanaman, pengendalian hama sampai panen dan penanganan pascapanen), demonstrasi plot dan sekolah lapang, pembuatan pupuk pestisida nabati/pupuk organik, temu lapang dan pembuatan saluran irigasi. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani Abebeu dapat menghasilkan kualitas dan pendapatan padi yang memuaskan.

Melalui pemberdayaan kelompok tani, partisipasi pemerintah dapat dilihat dalam bentuk pemberian bantuan berupa pengadaan traktor dan benih padi serta biaya penanaman. Pemerintah juga sangat memerhatikan dan antusias dalam meningkatkan produksi padi sawah. Hal ini dapat dilihat dari hasil panen sebelum dan sesudah pemberdayaan kelompok tani mengalami peningkatan 10%. Untuk meningkatkan hasil produksi khususnya tanaman padi sawah pemerintah perlu

memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam pola produksi terutama dalam teknik bertani, meskipun para kelompok tani dan petani telah memiliki kemampuan dan pengalaman yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kepada aparat pemerintah di Kelurahan Kulahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe yang terkait, agar dapat lebih memperhatikan kehidupan kelompok tani dan petani padi sawah dan mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk peningkatan produksi padi serta meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik.

## PENUTUP

Penggerak utama pembangunan di sektor pertanian di wilayah tertinggal, adalah petani dan kelompoknya dalam arti luas (kelompok tani/gabungan kelompok tani, P3A, UPJA, wanita tani, dan sebagainya). Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya kualitas SDM penggerak utama ini, baik dalam hal pendidikan, pengetahuan maupun kemampuannya dalam mengadopsi teknologi maju, sehingga memerlukan upaya peningkatan kapasitasnya. Program peningkatan kapasitas (dalam bentuk pemberdayaan masyarakat) di daerah tertinggal perlu menjadi prioritas pemerintah.

Hal yang tidak kalah penting adalah dukungan kebijakan pemerintah daerah, mengingat kondisi saat ini dengan adanya otonomi daerah kelembagaan penyuluhan berada di dinas teknis yang bernaung di bawah pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas petani merupakan kunci utama dari pembangunan sumber daya manusia di perdesaan, terutama di daerah tertinggal. Oleh karena itu penguatan kapasitas petani dan kelompok tani dapat mengakselerasi pembangunan pertanian di wilayah tertinggal.

Untuk menggerakkan pembangunan pertanian di perdesaan, diperlukan dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam hal pendanaan dan fasilitasi. Melalui pemberdayaan kelompok tani, partisipasi pemerintah dapat dilihat dalam bentuk pemberian bantuan. Namun demikian, program pemerintah pusat hendaknya tidak menimbulkan ketergantungan petani, melainkan justru harus memacu kemampuan petani dan kelompoknya secara mandiri dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk usaha yang produktif. Bantuan yang diberikan dapat berupa kredit lunak dengan prosedur administrasi yang sederhana dan mudah diakses, tanpa agunan dan wajib dikembalikan,

diyakini lebih mendidik daripada memberi bantuan sarana produksi secara gratis. Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah disertai tanggung jawab pengembalian, diharapkan petani menjadi lebih bijak dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan skema pembiayaan untuk usaha tani yang produktif. Sebaliknya, program-program bantuan sarana produksi secara gratis akan membuat petani selalu tergantung pada bantuan dan kurang daya juang dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Penyuluhan pertanian yang terprogram dengan baik merupakan salah satu strategi dalam upaya meningkatkan kapasitas petani dan kelompok tani. Penyuluh dalam melakukan pendampingan kepada petani dan kelompok tani memerlukan fasilitasi sarana dan prasarana yang memadai, agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

Selain itu, untuk dapat melakukan penyuluhan dan pendampingan bagi petani, diperlukan penguatan kompetensi penyuluh. Salah satu cara adalah dilakukannya *Training of Trainer* (TOT) untuk penyuluh, sehingga dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang terkini kepada petani dan kelompoknya. Selain itu, penyuluh juga perlu difasilitasi dengan sarana diseminasi teknologi dan akomodasi (termasuk anggaran) yang memadai, agar dapat menjalankan tugas penyuluhan dan pendampingan secara reguler dengan baik, yang mampu berimprovisasi dengan inovasi dan dapat memberikan pengetahuan baru kepada petani. Intensitas penyuluhan dan pendampingan terhadap kelompok tani sangat menentukan dalam upaya meningkatkan kapasitas petani sebagai penggerak pembangunan pertanian. Dengan penguatan kapasitas petani, diharapkan akan terbangun petani dan kelompok tani yang kuat dan mandiri, sehingga mampu menjadi pelaku ekonomi perdesaan yang produktif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang telah membiayai dan memfasilitasi kajian hingga penulisan naskah ini. Demikian juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data dan informasi sampai penulisan naskah *review* ini, sehingga dapat diselesaikan pada waktunya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminah S. 2015. Pengembangan kapasitas petani kecil lahan kering untuk mewujudkan ketahanan pangan J Bina Praja [Internet]. [cited 2021 Oct 20]; 7(3):197–210. Available from: <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/17/16>.
- Anantanyu S. 2011. Kelembagaan petani: peran dan strategi pengembangan kapasitasnya. J SEPA [Internet]. [cited 2021 Oct 18]; 7(2):102–109. Available from: [https://www.academia.edu/37505557/Sapja\\_Anantanyu\\_Kelembagaan\\_Petani\\_Peran\\_Dan\\_Strategi\\_Pengembangan\\_Kapasitasnya](https://www.academia.edu/37505557/Sapja_Anantanyu_Kelembagaan_Petani_Peran_Dan_Strategi_Pengembangan_Kapasitasnya).
- [BPPSDMP] Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. 2018. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 25/Kpts/SM.060/I/02/18 tanggal 8 Februari 2018 tentang Pedoman penilaian kelompok tani. Jakarta: Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Jakarta (ID): Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. Indeks pembangunan desa 2014: “tantangan pemenuhan standar pelayanan minimum desa.” Jakarta (ID): Kementerian PPN/Bappenas.
- Chaikaire JU, Ani AO, Atoma CN, Tijjani AR. 2015. Capacity building: Key to agricultural extension survival. *Scholars J Agric and Vet Sci.* 2(1A):13–21.
- Darmawan A. 2018. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi di desa terisolir (Desa Sarongan, Banyuwangi, Jawa Timur). *J AKP* [Internet]. [cited 2021 Oct 18]; 8(1):79-97. Available from: <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/akp>.
- Eade D. 1998. Capacity building: an approach to people-centered development. Oxford (UK): Oxfam GB.
- Edralin J.S. 1997. The new local governance and capacity building: a strategic approach: examples from Africa, Asia, and Latin America. *J Reg Dev Stud.* 3:109–149.
- Farida U. 2013. Pengaruh aksesibilitas terhadap karakteristik sosial ekonomi masyarakat perdesaan Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. *J Wilayah dan Lingkung.* 1(1):49-66.
- Fiszbein A. 1997. The Emergence of Local Capacity: Lesson from Columbia. *World Development* 25(7):1029–1043.
- Frese M, Gielnik MM. 2014. The psychology of entrepreneurship. *Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav* [Internet]. [cited 2021 Oct 22]; 2014(1):413–38. Available from: doi: 10.1146/annurev-orgpsych-031413-091326.
- Hamilton W, Bosworth G, Ruto E. 2015. Entrepreneurial younger farmers and the “young farmer problem” in England. *Agric and Forest* [Internet]. [cited 2021 Oct 18]; 61(4):61–69. Available from: doi: 10.17707/AgricultForest.61.4.05.
- Herman S. 2008. Strategi kebijakan pembangunan pertanian di Papua Barat. *J Anal Kebijak Pertan.* 6(4):352–377.
- Hermanto, Swastika DKS. 2011. Penguatan kelompok tani: langkah awal peningkatan kesejahteraan petani. *J Anal Kebijak Pertan.* 9(4):371–390.
- Indraningsih KS, Swastika DKS, Iqbal M, Prasetyo B, Milindri A, Nahraeni W. 2015. Kajian kebijakan akselerasi pembangunan pertanian wilayah tertinggal melalui peningkatan kapasitas petani. Laporan Akhir Penelitian. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. 2014. Peraturan Pemerintah RI No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Jakarta (ID): Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. 2020. Peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024. Jakarta (ID): Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan.
- Khairunnisa, Saleh A, Anwas OM. 2019. Penguatan kelembagaan petani padi dalam pengambilan keputusan adopsi teknologi IPB Prima. *J Penyul* [Internet]. [cited 2021 Nov 18]; 15(1):89–96. Available from: <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jupe/article/view/23460/16695>
- Koojiman J. 2021. Capacity building in agricultural development projects: a case study about women smallholder farmers in Kerala, India [Thesis]. [Jaipur (IN)]: Faculty of Technology, Policy and Management, University of Technology.
- Marius JA, Sumardjo, Slamet M, Asngari PA. 2007. Pengaruh faktor internal dan eksternal penyuluh terhadap kompetensi penyuluh di Provinsi Nusa Tenggara Bara. *J Penyul.* 3(2):78–89.
- Mentz JCN. 1997. Personal and institutional factors in capacity building and institutional development. Working paper No. 14. Maastricht (NL): ECDPM.
- Milen, A. 2004. Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Yogyakarta (ID): Pondok Pustaka Jogja.
- Muchtar, Sutaat, Achmadi, A. Suhendi, dan Suyanto. 2011. Masyarakat desa tertinggal: kebutuhan, permasalahan, aset, dan konsep model pemberdayaannya (studi di Desa Jambu, Engkangin, Sendangmulyo dan Mlatirejo). *J Litbang Kesejah Sos,* [Internet]. [cited 2020 April 16]; 16(01):17–34. Available from: <http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files.pdf>.
- Mulyadi TR. 2009. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian dan dampaknya pada perilaku petani padi di Jawa Barat [Disertasi]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor.

- Murni R. 2014. Sumber daya dan permasalahan sosial di daerah tertinggal: kasus Desa Patoameme, Kabupaten Boalemo. *Sosio Konsepsia* [Internet]. [cited 2021 Nov 04]; 4(1):260–273. Available from: <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/108/75>.
- Nazaruddin dan Anwarudin. 2019. Pengaruh penguatan kelompok tani terhadap partisipasi dan motivasi pemuda tani pada usaha pertanian di Leuwiliang, Bogor. *J Agribis Terpadu* [Internet]. [cited 2021 April 20]; 12(1):1–14. Available from: DOI: <http://dx.doi.org/10.33512/jat.v12i1>.
- Ndibo, Dartin. 2020. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan produksi padi sawah pada Kelompok Tani Abebeu Kelurahan Kulahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe. *J Ilmu Manaj Sos Human*. 2(2):84–92.
- Nuryanti S, Swastika DKS. 2011. Peran kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian. *Forum Penelit Agro Ekon*. 29(2):115–128.
- Nuryanto, B.G. 2008. Kompetensi penyuluh dalam pembangunan pertanian di Provinsi Jawa Barat [Disertasi]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor.
- Permana S, Rijanta R, Hizbaron R. 2019. Keterkaitan ekonomi perdesaan dan perkotaan di daerah tertinggal (Kasus Kabupaten Aceh Singkil). *J Sains Informasi Geografi* [Internet]. [cited 2020 April 22]; 2(2):24–31. Available from: <http://journal.umgo.ac.id/index.php/GEOUMGo/article/view/280/231>.
- Pratama A, Mustam M, Djumiarti T. 2014. Pengembangan kapasitas kelembagaan dalam koordinasi pelayanan perizinan di BPPT Kota Semarang. *J Public Policy Manag Rev* [Internet]. [cited 2020 April 14]; 3(1):1–11. Available from: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/4373>.
- Ruhimat IS. 2017. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam pengembangan usaha tani agroforestry: Studi kasus di Desa Cukangkawung, Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. *J Penelit Sos Ekon Kehutan* [Internet]. [cited 2021 Nov 14]; 14(1):1–17. Available from: <http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/search>
- Rustandi AH, Harniati, Kusnadi D. 2020. Strategi peningkatan kapasitas petani dalam komunitas usaha tani jagung (*Zea mays l*) di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. *J Inov Penelit* [Internet]. [cited 2021 Nov 02]; 1(3):589–597. Available from: <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/118/91>.
- Sandra TA, Janthy TH, Syahbandar MY. 2020. Pengembangan daerah tertinggal di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. [cited 2021 Nov 02]; 1(1):1–8. Available from: <https://jom.unpak.ac.id/index.php/teknikpwk/article/view/1412/1132>.
- Sari EA, Saragih MTB, Shariati IA, Sofyan S, Baihaqi RA, Nooraeni R. 2020. Klasifikasi kabupaten tertinggal di kawasan timur indonesia dengan support vector machine. *J Informat Komput*. 3(3):188–195.
- Schmidt S, W Magigi, B Godfrey. 2015. The organization of urban agriculture: Farmer associations and urbanization in Tanzania". *Cities* J. 42:153–159.
- Sekretariat Kabinet RI. 2015. Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019. Jakarta (ID): Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Setiawan I. 2006. Analisis akses desa-desa di Kabupaten Bandung terhadap sumber-sumber produktif (suatu analisis dengan pendekatan integrated rural accessibility planning). Laporan Akhir Penelitian. Bandung (ID): Jurusan Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Padjajaran
- Slamet M. 2008. Menuju penyuluh profesional. Bogor (ID): Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Soleh A. 2017. Strategi pengembangan potensi desa. *J Sungkai* [Internet]. [cited 2021 Agust 02]; 5(1):32–52. Available from: <https://ejournal.upp.ac.id>.
- Syahza A, Suarman. 2014. Model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan. *J Ekon Keu* [Internet]. [cited 2021 Agust 02]; 18(3):365-386. Available from: <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/154/145>.
- Syamsuri. 2014. Analisis teoritik model pembangunan daerah (desa) tertinggal. *JISPAR* [Internet]. [cited 2021 December 18]; 3(2):1–29. Available from: <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/373>.
- [UNDP] United Nations Development Programme. 2010. Capacity Development: Measuring Capacity [Internet]. [cited 2014 May 12]; Available from: [http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/undp-paper-on-measuring-capacity/UNDP\\_Measuring\\_Capacity\\_July\\_2010.pdf](http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/undp-paper-on-measuring-capacity/UNDP_Measuring_Capacity_July_2010.pdf).
- Veronice, Yelfiarita, Darnetti. 2015. Analysis of characteristics extension workers to utilization of information and communication technology. *Int J Advanced Sci Engineer Inform Technol* [Internet]. [cited 2021 Agust 02]; 5(4):303–305. Available from: [http://ijaseit.insightsociety.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=9&Itemid=1&article\\_id=555](http://ijaseit.insightsociety.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=1&article_id=555).
- Veronice, Helmi, Henmaid, Arif E. 2018. Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani kecil di kawasan pertanian melalui pendekatan manajemen pengetahuan. *J Applied Agric Sci and Technol* [Internet]. [cited 2020 July 21]; 2(2):1–10. Available from: [https://www.researchgate.net/publication/327678236\\_Pengem](https://www.researchgate.net/publication/327678236_Pengem)

bangun\_Kapasitas\_petani\_dan\_Kelembagaan\_di  
\_Kawasan\_Pertanian.

Wilhemina Q, Ivy Y, Tawiah MJ, Joseph G. 2010. Building the capacity of farmer-based organisation for sustainable rice farming in Northern Ghana. *J of Agric Sci.* 2(1):93–106.

Windari W. 2021. Model pemberdayaan masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi lokal berbasis produksi di pedesaan. *J Agirekstensia*

[Internet]. [cited 2021 December 18]; 20(1):90–106. Available from: <https://jurnal.polbangtanmalang.ac.id>.

Wiratama S, Diartho HC, Prianto FW. 2018. Analisis pembangunan wilayah tertinggal di Provinsi Jawa Timur. *J Ekon Bisnis dan Akuntansi* [Internet]. [cited 2021 Agust 02]; 5(1):16–20. Available from: <https://jurnal.unej.ac.id>.